

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Kebijakan Pendidikan

Menurut United Nations dalam H.A.R. Tilaar (2009), kebijakan merupakan suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas tertentu atau suatu rencana. Hal sama dipaparkan James E. Anderson, kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Berbeda dengan kebijaksanaan, kebijaksanaan lebih menekankan pada faktor-faktor emosional dan irasional. Bukan berarti bahwa suatu kebijaksanaan tidak mengandung unsur rasional.

Menurut H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2009: 140) kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Pelaksanaan tugas pendidikan, diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan *stakeholder* lembaga pendidikan itu dapat dicapai. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan pengaturan kehidupan sesama manusia. Hal ini

menunjukkan aspek sosialitas dari keberadaan manusia. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan tidak terlepas dari hakekat manusia. Sehingga, kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. Mengenai sumber daya manusianya (pendidik) diperlukan para pendidik profesional. Undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2004 merupakan kebijakan pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen & Anne-Maie O'Neil kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan (Riant Nugroho, 2008: 36).

Pada era globalisasi, profesi guru bermakna strategis karena mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa. Esensi dan eksistensi makna strategis profesi guru diakui dalam realitas sejarah pendidikan di Indonesia. Pengakuan itu memiliki kekuatan formal tatkala tanggal 2 Desember 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan guru sebagai profesi. Satu tahun kemudian, lahir Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen, sebagai dasar legal pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya.

2. Kebijakan Sertifikasi Guru

a. Sertifikasi Guru dan Gambaran Umum

Sertifikasi guru adalah pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dihargai dengan peningkatan kesejahteraan yang layak (Masnur Muslich, 2007: 2). Senada menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 pasal 8 adalah guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Nation Commission on Educational Services (NCES) dalam Enco Mulyasa (2007: 34) memberikan pengertian sertifikasi secara lebih umum. *Certification is a Procedure Whereby the State Evaluates and Reviews a Teacher Candidate's Credentials and Provider him or her License to Tech.* Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sertifikasi sebagai suatu proses pemberian pengakuan seseorang telah memiliki kompetensi. Sertifikasi ialah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Pemerdiknas) Nomor 18 Tahun 2007 menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi pendidik. Uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup;

- 1) Kualifikasi akademik
- 2) Pendidikan dan pelatihan
- 3) Pengalaman mengajar
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- 5) Penilaian dari atasan dan pengawas
- 6) Prestasi akademik
- 7) Karya pengembangan profesi
- 8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- 9) Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial
- 10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

Mengacu pada Pemerdiknas No 18 tahun 2007 dalam persyaratan utama peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah guru yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-4). Selain itu, peserta sertifikasi tiap tahun dibatasi oleh kuota dan jumlah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi

akademik lebih besar daripada kuota, maka Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam menetapkan peserta sertifikasi juga mempertimbangkan kriteria (dalam Masnur Muslich, 2007: 23-24);

- 1) Masa kerja atau pengalaman mengajar
- 2) Usia
- 3) Pangkat atau golongan (bagi PNS)
- 4) Beban mengajar
- 5) Jabatan atau tugas tambahan, dan
- 6) Prestasi kerja

Undang-undang guru dan dosen dalam bab I pasal I kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi guru antara lain (Nazaruddin Rahman, 2009: 48);

- 1) Latar belakang pendidikan

Latar belakang pendidikan atau akademik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kompetensi guru. Semakin tinggi tingkat akademik seseorang biasanya menunjukkan lebih matang dalam berfikir, menganalisis berbagai macam permasalahan. Kegiatan mengajar guru akan lebih memiliki kreativitas menggunakan metode yang

diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga tidak monoton dan siswa lebih antusias mengikutinya.

2) Individu

Faktor individu adalah keinginan dari diri sendiri yang dimiliki oleh guru dalam mengembangkan kompetensinya. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan belajar sendiri dan selalu berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

3) Pelaksanaan supervisi

Menurut *dictionary of education good carter* dalam Sahertian (2000: 7) memberi pengertian bahwa supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode evaluasi pengajaran.

b. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Suyatno dalam buku panduan sertifikasi menjelaskan banyak sekali tujuan sertifikasi guru, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Agen pembelajaran berarti pelaku proses pembelajaran, bukan broker

pembelajaran. Bila belum layak, guru perlu mengikuti pendidikan formal tambahan atau pelatihan profesional tertentu.

- 2) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Mutu siswa sebagai hasil proses pendidikan akan sangat ditentukan oleh kecerdasan, minat, dan upaya siswa bersangkutan. Mutu siswa juga ditentukan oleh mutu guru dan mutu proses pembelajaran, baik proses pembelajaran di lingkup sekolah maupun lingkup nasional.
- 3) Meningkatkan martabat guru. Segala pendidikan formal dan pelatihan yang telah diikuti, diharapkan guru mampu “memberi” lebih banyak kepada kemajuan siswa. Dengan memberi lebih banyak, martabat kita sebagai guru akan meningkat.
- 4) Meningkatkan profesionalitas guru. Mutu profesionalitas guru banyak ditentukan oleh pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri lain oleh guru bersangkutan. Sertifikasi guru hendaknya dapat kita jadikan sebagai langkah awal menuju guru yang professional (Suyatno, 2008: 2).

c. Tunjangan Profesi Guru

Selain gaji pokok, guru juga akan diberikan beberapa macam tunjangan. Tunjangan-tunjangan yang dimaksud ialah tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus. Tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga. Guru PNS dan guru swasta yang telah memiliki sertifikat pendidik akan diberi

tunjangan profesi setara dengan gaji pokok (Barnawi dan Mohammad Arifin, 2012: 31-32). Dalam UU RI No. 14 tahun 2005 pasal 16 disebutkan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang besarnya setara 1 kali gaji pokok pada tingkat masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Tunjangan diberikan kepada guru yang memiliki persyaratan sebagai berikut (Farida Sarimaya, 2008:37);

- 1) Memenuhi persyaratan akademik sebagai guru sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 2) Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi unik oleh Departemen.
- 3) Melaksanakan tugas sebagai guru tetap yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan yang memiliki izin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah dengan beban mengajar; minimal 24 jam mengajar jam tatap muka dan maksimal 40 jam tatap muka per minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah.
- 4) Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya
- 5) Berusia maksimal 60 tahun, dan

- 6) Melaksanakan kewajiban sebagai guru sebagaimana diatur dalam pasal 20 UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

B. Kajian Teori

1. Interaksi Sosial George Simmel

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, oleh karena itu interaksi sosial merupakan syarat umum terjadinya aktivitas dalam masyarakat. Bentuk lain dari proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, dengan kelompok manusia (Syahrial Syarbaini dan Rudiyanata, 2009: 25-26). Individu merupakan pelaku interaksi karena tidak ada individu yang mampu bertahan sendiri. Interaksi berjalan antar individu dengan sesama individu lain atau dapat juga terjadi antar kelompok. Hubungan seseorang bisa jadi bersifat sementara atau permanen, serius atau tidak tapi hal ini mengikat manusia terus menerus. Hubungan yang terus terjalin akan membentuk sebuah konsensus dalam masyarakat. Akan tetapi tidak selamanya masyarakat berada dalam konsensus karena setiap individu memiliki kepentingan.

Dalam *The Philosophy of Money* Simmel menyebutkan beberapa prinsip umum yang berfungsi dalam analisisnya tentang uang, tentang nilai dan apa yang membuat benda itu bernilai. Poin utamanya ialah nilai sesuatu ditentukan oleh jaraknya dengan aktor. Ia tidak akan bernilai jika

terlalu jauh dan terlalu sulit untuk diperoleh. Objek yang paling bernilai adalah yang dapat dicapai dengan usaha yang besar (George Ritzer, 2012: 289). Tidak semua orang bisa mendapatkan tunjangan profesi yang merupakan konsekuensi logis yang menyertai sertifikat pendidik. Di SMA N 11 masih ditemukan beberapa guru yang harus berusaha lebih untuk mendapatkan tunjangan profesi. Namun ada sebagian kecil guru yang sudah memiliki sertifikat profesi pendidik namun belum mampu mendapatkan tunjangan profesi yang dicita-citakan. Hal ini karena untuk mendapatkannya guru harus melakukan usaha besar. Bahkan usaha ini bisa saja bersifat negatif seperti sikut-sikutan dengan teman sendiri. Hal ini yang memang terjadi di sekolah dimana uang mampu merenggangkan interaksi serta hubungan sosial mereka hanya untuk mendapatkan tambahan satu kali gaji pokok.

Geomerti sosial Simmel membahas tentang ukuran kelompok pada level yang lebih umum. Dia berpendirian bahwa penambahan ukuran suatu kelompok atau masyarakat meningkatkan kebebasan individu. Simmel juga merumuskan dalam teorinya terhadap bentuk-bentuk sosial adanya supra ordinasi dan subordinasi. Supra ordinasi dan subordinasi mempunyai hubungan timbal balik. Sang pemimpin tidak ingin menentukan secara lengkap pemikiran dan tindakan orang lain. Lebih tepatnya sang pemimpin berharap bawahannya bereaksi baik positif maupun negatif (George Ritzer, 2012: 289). Umumnya supra ordinasi merupakan sekumpulan orang yang menduduki atasan sedangkan subordinasi mereka

yang berada pada posisi bawahan. Ada dominasi yang dilakukan oleh supra ordinasi terhadap subordiansi. Tetapi analisis Simmel lebih menekankan pada dominasi supraordinasi tidak sampai memberikan ruang yang benar-benar tertutup untuk kebebasan individu artinya sampai derajat tertentu individu mempunyai kebebasan pribadi.

Dominasi merupakan kekuasaan yang dibangun menjadi struktur sosial yang stabil dan tahan lama. Dominasi merupakan alat yang membentuk para elite menjadi kelompok dominan. Paksaan dan bujukan merupakan struktur dominasi yang bekerja melalui pembatasan dan berhubungan dengan bentuk-bentuk dasar, yakni kekuasaan. Para atasan dapat mempengaruhi bawahan dengan cara menetapkan pilihan tindakan yang terbuka bagi mereka dan pertimbangan yang dapat mereka ambil dalam memilih alternatif yang ada (John Scott, 2013: 205). Adanya kebijakan sertifikasi di SMA N 11 melahirkan subordinasi di masyarakat sekolah. Adanya kelas atas dan bawah dipengaruhi karena adanya kecemburuan sosial terhadap guru yang telah tersertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi dengan mudah. Dominasi guru pasca adanya kebijakan sertifikasi semakin kuat. Terbetuk beberapa kelompok baru seperti kelompok guru tersertifikasi, kelompok guru tersertifikasi tetapi belum mendapatkan tunjangan profesi, dan kelompok guru belum tersertifikasi. Interaksi antara guru setelah adanya tunjangan dan sebelum adanya tunjangan profesi berbeda. Kerenggangan hubungan sosial guru semakin nampak ketika adanya tunjangan sertifikasi bahkan karena adanya

prasyarat 24 jam mengajar dimana guru harus bersaing memperebutkan 24 jam dengan sesama guru mata pelajaran. Bahkan sampai tercipta senior dan junior didalamnya, guru yang dianggap lebih tua atau lebih lama dianggap lebih memiliki dominasi dibandingkan guru yang lebih muda darinya. Hal ini yang kemudian menciptakan permasalahan yang merujuk pada kerenggangan interaksi antara guru.

Adapun faktor-faktor yang mendasari proses interaksi sosial (Bimo Walgito, 1991: 65-73) yaitu:

a. Faktor Imitasi

Imitasi merupakan dorongan untuk meniru orang lain, seperti yang dikemukakan oleh G. Tarde (Bimo walgito, 1991):

“Masyarakat itu tiada lain dari pengelompokan manusia dimana individu-individu yang satu mengimitasi dari yang lain dan sebaliknya; bahkan masyarakat itu baru menjadi masyarakat sebenarnya apabila manusia mulai mengimitasi kegiatan manusia lainnya. *La societe e’est I’imitation*”.

b. Faktor Sugesti

Sugesti adalah pengaruh psikis baik yang datang dari diri sendiri maupun datang dari orang lain, yang pada umumnya diterima tanpa adanya kritik dari individu yang bersangkutan. Sugesti dibedakan menjadi dua yaitu (1) auto-sugesti, yaitu sugesti terhadap diri sendiri, yang datang dari dalam individu yang bersangkutan, dan (2) hetero-sugesti, yaitu sugesti yang penting dalam kehidupan sehari-hari.

c. Faktor Identifikasi

Identifikasi merupakan dorongan untuk menjadi *identific* (sama) dengan orang lain. Kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini.

d. Faktor Simpati

Simpati merupakan proses dimana seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Ketertarikan ini seakan-akan berlangsung dengan sendirinya, apa sebabnya merasa tertarik sering tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut. Lawan dari simpati adalah antipati, yaitu kecenderungan individu untuk menolak orang lain.

Bentuk interaksi sosial diantaranya ada *assosiatif* dan *dissosiatif*. Interaksi yang terjadi di sekolah lebih merujuk pada interaksi *dissosiatif*. Interaksi *dissosiatif* antara lain persaingan, *kontravensi*, dan pertentangan atau pertikaian. Diantara ketiga bentuk tersebut yang paling kuat yakni *kontravensi*. *Kontravensi* merupakan proses sosial yang berada diantara persaingan dengan pertentangan atau pertikaian yang ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian tentang diri seseorang atau rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keragu-raguan terhadap kepribadian seseorang. Menurut Leopold von Wiese dan Howard Becker ada lima hal dalam *kontravensi* yang mencakup (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011: 89-90);

- a. Proses umum kontravensi meliputi perbuatan, seperti penolakan, menghalang-halangi, perlawanan, perbuatan, keengganan, gangguan-gangguan, perbuatan ekekrasan protes, dan perbuatan mengacaukan pihak lain.
- b. Bentuk-bentuk kontravensi yang sederhana, seperti menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, memaki-maki orang lain, membuat surat selebaran, mencerca, memfitnah, melemparkan beban pembuktian kepada orang lain, dan sebagainya.
- c. Bentuk-bentuk kontravensi yang intensif, seperti penghasutan, menyebarkan isu-isu, mengecewakan pihak lain, dan sebagainya.
- d. Kontravensi yang bersifat rahasia, seperti menggossipkan rahasia pihak lain, perbuatan khianat, dan sebagainya.
- e. Kontravensi yang bersifat taktis, seperti mengejutkan pihak lawan, mengganggu atau membingungkan pihak lain.

Tipe-tipe kontravensi di antaranya;

- a. Kontravensi antargolongan dalam suatu masyarakat.
- b. Antagonisme keagamaan
- c. Kontravensi intelektual
- d. Oposisi moral

2. Klik "*clique*"

Kelompok sosial sangat penting karena sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di dalamnya. Tanpa kita sadari sejak lahir hingga ajal

kita menjadi anggota berbagai jenis kelompok, dan menggunakan tiga kriteria, yakni kesadaran jenis, hubungan satu sama lain, dan ikatan organisasi (Kamanto Sunarto, 2000: 87). Kelompok sosial dapat terbentuk karena adanya interaksi sosial di dalam suatu masyarakat, sekumpulan individu yang saling berinteraksi akan memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok atau bagian dari masyarakatnya.

Pengelompokan atau pembentukan klik mudah terjadi di sekolah. Menurut Ravik Karsidi (2008: 112) suatu klik terbentuk bila dua orang atau lebih menjalin persahabatan sehingga dalam keseharian telah terikat pada kehidupan bersama baik dalam maupun luar sekolah. Mereka saling merasakan apa yang dialami salah satu anggota kelompok dan mampu mengungkapkan perasaan yang selama ini tersembunyi. Keanggotaan klik bersifat sukarela dan tidak formal. Seseorang diterima atau ditolak atas persetujuan bersama. Walaupun klik tidak mempunyai aturan yang jelas, namun ada nilai yang dijadikan dasar untuk menerima. Hal senada diutarakan Major Polak (1982: 141) ada kelompok-kelompok yang mementingkan banyak anggota, mereka yang coraknya massal, tetapi ada pula yang menitikberatkan nilai anggota dengan kata lain mereka yang bersifat elite (orang terpilih) atau kader. Salah satunya dapat disebut *clique* dari orang kaya.

Kebijakan sertifikasi guru melahirkan kelompok-kelompok kecil di sekolah khususnya di SMA N 11 Yogyakarta. Kelompok-kelompok tersebut terbagi atas dasar kepentingan dari setiap individu. Individu

masuk dalam kelompok karena merasa keberadaannya diakui. Fungsi kelompok pun semakin nampak ketika permasalahan yang mereka hadapi dibahas dalam kelompok karena secara individu manusia memang punya naluri untuk hidup berkelompok. Kekuatan kelompok-kelompok ini tergantung pada basis massa yang menjadi pengikut serta materi yang dimiliki kelompok tersebut.

C. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang relevan dari penelitian yang akan peneliti laksanakan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sari Istika Rini pada tahun 2011 mahasiswa Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul “Dampak Kebijakan Sertifikasi Guru Terhadap Produktivitas Guru Pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas Dalam Membuat Karya Tulis Ilmiah di Kecamatan Wonosari Gunungkidul”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi belum berdampak terhadap motivasi guru dalam membuat karya tulis ilmiah sehingga belum berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas guru dalam membuat karya tulis ilmiah. Hambatan dalam membuat karya tulis ilmiah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pertama kurangnya kemampuan guru untuk menulis, faktor lanjut usia, serta kurangnya motivasi. Pada faktor eksternal meliputi keterbatasan waktu 24 jam mengajar, berorientasi pada program sekolah/kebijakan khusus sekolah, keterbatasan fasilitas sarana prasarana

serta dana yang mendukung Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara penelitian guru, minimnya penghargaan dan apresiasi pemerintah, kurangnya sosialisasi dalam membuat karya tulis ilmiah, persepsi yang dibangun untuk membuat karya tulis ilmiah terbatas pada proses kenaikan pangkat dari IV/a ke IV/b. Kurangnya pengetahuan guru terhadap korelasi antara portofolio dengan karya tulis ilmiah, dan terakhir kekosongan pada salah satu komponen portofolio dapat diganti melalui PLPG.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan adalah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Selain itu, sama-sama membahas tentang sertifikasi guru sebagai masalah yang diangkat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan, penelitian yang dilakukan Sari lebih fokus terhadap dampak sertifikasi dalam pembuatan karya tulis ilmiah serta hambatan yang dirasakan guru. Pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada fenomena sertifikasi guru dalam hubungannya dengan interaksi sosial. Selain itu, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, penelitian Sari dilakukan di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Wonosari. Lokasi yang akan peneliti teliti di SMA Negeri kota Yogyakarta tepatnya SMA N 11 Yogyakarta.

2. Penelitian yang relevan kedua adalah penelitian yang dilakukan Sri Lestari pada tahun 2010 mahasiswa jurusan pendidikan Islam Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul “Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kinerja Guru MTs N Mlinjon Filial Trucuk Klaten”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sertifikasi di MTs N Mlinjon Filial Trucuk Klaten dilaksanakan di bawah naungan Departemen Agama, guru yang telah lulus sertifikasi di MTs N Mlinjon Filial Trucuk Klaten adalah 12 guru baik dari mata pelajaran umum maupun mata pelajaran agama. Guru yang diajukan mengikuti sertifikasi guru berasal dari guru yang sudah PNS maupun guru non PNS. Sebagian guru lulus melalui jalur diklat karena ada faktor yang belum dapat dipenuhi, antara lain guru harus membuat buku atau modul untuk mata pelajaran yang diampunya. Guru yang lulus sertifikasi memiliki kemampuan yang berbeda-beda hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh guru. (2) kinerja guru sebelum sertifikasi belum begitu maksimal guru membuat RPP bersama-sama dengan MGMP, ketika mengajar para guru masih menggunakan metode ceramah, belum menggunakan media pembelajaran dan strategi pembelajaran. Guru belum memenuhi jam mengajar 24 jam, evaluasi diadakan belum secara rutin yaitu setelah selsai satu kali materi dan belum mengadakan remidi ketika ada siswa yang belum mencapai KKM. (3) sertifikasi berpengaruh terhadap kinerja guru MTs N Mlinjon Filial Trucuk Klaten dengan indikator sebagai berikut (a) membuat RPP dan silabus untuk satu semester secara mandiri (b) mengajar 24 jam dna jika di satu sekolah belum memenuhi mengajar disekolah lain (c)

menggunakan strategi dalam metode pembelajaran ketika proses belajar mengajar (d) menggunakan metode pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami materi pelajaran yang dimiliki (e) mengadakan evaluasi rutin setiap minggunya (f) mengadakan remedi jika ada siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar dari 12 guru tersebut telah mencapai indikator seperti di atas maka sertifikasi dikatakan berpengaruh terhadap kinerja guru.

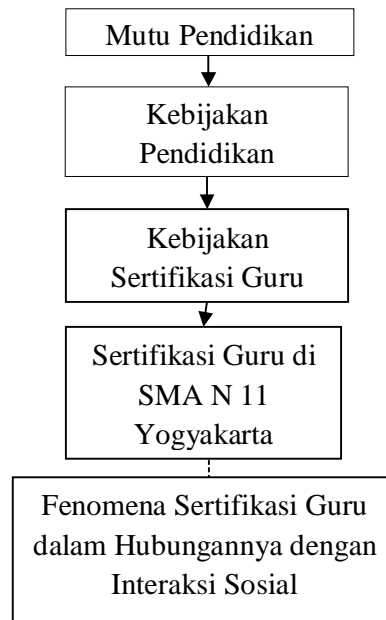
Persamaan dengan penelitian yang diteliti yakni sama-sama meneliti tentang sertifikasi guru. Namun dalam penelitian Sri hanya melihat satu indikator saja yakni kinerja guru pasca sertifikasi. Peneliti pada penelitian ini ingin melihat fenomena sertifikasi guru dalam hubungannya dengan interaksi sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti yakni responden serta lokasinya. Penelitian ini informan yang digunakan yakni guru yang telah lulus sertifikasi, sedangkan peneliti menggunakan responden baik yang lulus sertifikasi maupun yang belum lulus sertifikasi. Lokasi penelitian ini di Mts N Mlinjon Klaten sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di SMA N 11 Yogyakarta.

D. Kerangka Pikir

Mutu pendidikan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara maju memang masih tertinggal di beberapa bidang. Upaya pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan dilakukan salah satunya melalui

peningkatan penyelenggara tenaga pendidik dan kependidikan melalui kebijakan sertifikasi guru. Guru memiliki posisi yang strategis dalam pembenahan mutu pendidikan kedepan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki kualitas guru di Indonesia. Pendidik atau guru dituntut memiliki kompetensi akademik serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi akademik dalam hal ini yakni tingkat pendidikan minimal yang harus dikuasai guru yang dibuktikan melalui ijazah. Kompetensi yang harus dikuasai guru yakni kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Upaya peningkatan kompetensi tersebut kemudian diapresiasi pemerintah melalui program sertifikasi guru. Melalui program tersebut pemerintah berharap terjadinya peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan sertifikasi guru kemudian melahirkan isu yang mencederai citra guru. Diantaranya pemberitaan tentang pemalsuan dokumen porto folio, pemalsuan ijazah, serta kinerja guru yang dirasa semakin tidak profesional pasca mendapat tunjangan. Selain permasalahan teknis pun dirasa dibebankan kepada guru dengan adanya prasyarat 24 jam mengajar yang mengakibatkan mobilisasi guru semakin tinggi. Melihat permasalahan tersebut peneliti kemudian tertarik melakukan penelitian tentang fenomena sertifikasi guru dalam hubungannya dengan interaksi sosial di SMA Negeri 11 Yogyakarta.



Bagan I. Kerangka Pikir